

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Riset

Objek dalam penelitian ini adalah pengaruh *coercive pressure*, *good corporate governance*, dan kualitas audit terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi.

3.2 Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini, populasinya adalah semua perusahaan yang telah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2019. Kemudian sampel dari populasi ini akan diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel dengan dibatasi oleh ketentuan tertentu, dalam penelitian ini, ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

1. Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019
2. Perusahaan menyediakan kelengkapan data yang dibutuhkan

Tabel 3.1 Sampel Penelitian

	2017	2018	2019	Total
Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019	553	608	662	1824
Perusahaan tidak menyediakan kelengkapan data yang diperlukan	(13)	(17)	(43)	(74)
Total	540	591	619	1750

Sumber : Data diolah, 2020

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan berdasarkan pada data sekunder yaitu data yang bersifat tidak langsung dan melalui perantara. Pada penelitian ini data akan diambil dari:

1. Laporan tahunan pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019 yang dapat diunduh dari *website* perusahaan maupun *website* Bursa Efek Indonesia.
2. Data keanggotaan UNGC yang dapat diakses dari *website* *United Nations Global Compact*

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.4.1 Variabel Dependen

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengungkapan kebijakan antikorupsi sebagai variabel dependennya. Menurut Okparizan dan Andhika (2020), kebijakan antikorupsi merupakan kesatuan kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi. Sehingga pengungkapan kebijakan antikorupsi menjadi bentuk keterlibatan dalam menanggulangi korupsi dan dalam penelitian ini pengukurannya menggunakan variabel *dummy* yaitu apabila perusahaan mengungkapkan kebijakan antikorupsi maka akan diberi nilai 1 (satu) dan sebaliknya apabila perusahaan tidak mengungkapkan kebijakan anti korupsi maka akan diberi nilai 0 (nol).

3.4.2 Variabel Independen

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa variabel independen yaitu kepemilikan pemerintah, *government tenders*, kepemilikan asing, *international operations*, dan keanggotaan UNGC, komite tata kelola, independensi dewan komisaris, kualitas audit.

3.4.2.1 Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan pemerintah lebih terlihat di mata publik sehingga cenderung sensitif secara politik, hal ini menimbulkan harapan publik agar perusahaan lebih transparan (Muttakin & Subramaniam, 2015). Kepemilikan pemerintah akan diukur dengan menggunakan variabel dummy yaitu akan diberi kode 1 jika terdapat kepemilikan pemerintah dan kode 0 jika tidak terdapat kepemilikan pemerintah. Metode pengukuran ini sejalan dengan penelitian oleh Sari, dkk (2020) dan Cahaya (2012).

3.4.2.2 *Government Tenders*

Government tenders merupakan kondisi dimana perusahaan memiliki kontrak, proyek, maupun tender dari pemerintah (Maulida, 2013). Dalam penelitian ini, apabila perusahaan memiliki tender, perjanjian, maupun kontrak dengan pemerintah maka akan diberi kode 1, sebaliknya apabila tidak memiliki tender, kontrak, maupun

perjanjian dengan pemerintah maka akan diberi kode 0. Metode pengukuran ini juga telah digunakan oleh Amran & Haniffa (2011) dan Sari, dkk (2020).

3.4.2.3 Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan pihak asing yang umumnya berasal dari negara maju sehingga cenderung lebih peduli dan peka terhadap akuntabilitas perusahaan demi menciptakan bisnis yang berkelanjutan (Sari, dkk. 2020). Dalam penelitian ini, kepemilikan asing akan diukur dengan variabel *dummy*, yaitu apabila terdapat kepemilikan pihak asing dalam saham perusahaan maka akan diberi kode 1, apabila tidak terdapat kepemilikan pihak asing dalam saham perusahaan maka akan diberi kode 0. Metode pengukuran variabel ini sejalan dengan penelitian oleh Sari, dkk (2020)

3.4.2.4 *International Operations*

International operations adalah kegiatan perusahaan yang melibatkan rekan bisnis asing baik dalam penjualan kepada pihak asing, anak perusahaan di luar negeri, maupun kantor cabang di luar negeri (Sari, dkk. 2020). Dalam penelitian ini, apabila perusahaan memiliki kegiatan yang melibatkan rekan bisnis asing maka akan diberi kode 1 dan sebaliknya jika tidak terdapat keterlibatan pihak

asing dalam operasional perusahaan maka diberi kode 0. Metode ini juga telah digunakan dalam penelitian Cahaya et al. (2017) dan Sari, dkk (2020).

3.4.2.5 Keanggotaan UNGC

United Nations Global Compact Membership merupakan keanggotaan dalam organisasi internasional dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berinisiatif membangun strategi dan operasi dalam menangani isu hak asasi manusia, buruh, lingkungan, dan antikorupsi. Untuk pengukuran variabel ini, peneliti akan memberikan kode 1 apabila perusahaan tergabung dalam keanggotaan UNGC dan kode 0 apabila perusahaan tidak tergabung dalam keanggotaan UNGC. Pengukuran yang sama juga digunakan dalam penelitian Barkemeyer et al. (2015) dan Sari, dkk (2020).

3.4.2.6 Komite Tata Kelola

Komite tata kelola yaitu komite yang bertujuan memastikan bahwa perusahaan telah menjalankan bisnisnya sesuai dengan tata kelola yang berlaku (Charitou et al. 2007). Pada penelitian ini, peneliti akan mengukur variabel komite tata kelola dengan variabel *dummy* yaitu pemberian kode 1 apabila perusahaan memiliki komite tata kelola dalam struktur organisasinya dan kode 0 apabila perusahaan tidak memiliki komite tata kelola dalam struktur

organisasinya. Metode ini sejalan dengan penelitian oleh Silvia dan Hartomo (2019).

3.4.2.7 Independensi Dewan Komisaris

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), independensi dewan komisaris merupakan cerminan dari dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham dan perusahaan itu sendiri baik secara bisnis maupun kekeluargaan. Berikut pengukuran variabel independensi dewan komisaris yang digunakan dalam penelitian ini:

$$\text{INDP} = \frac{\text{Jumlah anggota dewan komisaris independen}}{\text{Jumlah keseluruhan dewan komisaris}}$$

3.4.2.8 Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan peluang auditor dalam penemuan bukti dan pengungkapan secara transparan atas pelanggaran klien (DeAngelo, 1981). Cerminan kualitas auditor ini dapat terlihat pada Kantor Akuntan Publik yang bekerjasama dengan perusahaan. Menurut DeAngelo (1981), layanan auditor dari KAP *Big 4* lebih berkualitas daripada *Non-Big 4*. Pengukuran kualitas audit dalam penelitian ini adalah menggunakan variabel *dummy* yaitu kode 1 akan diberikan jika perusahaan diaudit oleh KAP *Big 4* dan kode 0 akan diberikan jika perusahaan diaudit oleh KAP *Non-Big 4*. Metode ini juga digunakan dalam penelitian oleh Silvia dan Hartomo (2019).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data akan dikumpulkan dari data arsip melalui unduhan pada website perusahaan maupun website Bursa Efek Indonesia dikarenakan data pada penelitian ini merupakan data sekunder. Data yang akan diambil merupakan data laporan keuangan tahunan dari perusahaan yang sudah *go public* pada periode 2017-2019 dan data keanggotaan UNGC pada tahun 2017-2019.

3.6 Teknik Analisis Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian, maka teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistic deskriptif dan analisis regresi logistik atau *logistic regression*. Pengujian dengan regresi logistik ini tidak memerlukan adanya uji asumsi klasik seperti saat menggunakan analisis regresi linier berganda.

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis dengan statistik deskriptif memiliki tujuan mendapatkan informasi maupun gambaran keseluruhan berupa standar deviasi, nilai maksimal, nilai rata-rata, serta nilai minimal atas variabel-variabel tertentu dalam penelitian.

3.6.2 Uji Kelayakan Model Regresi Logistik

Uji kelayakan ini bertujuan memastikan ketepatan dan kemampuan model regresi dalam menjelaskan data penelitian. Pengujian yang dilakukan menggunakan *Chi-Square Goodness-of-Fit Test*. Apabila pengujian ini menunjukkan tingkat alfa kurang dari 0,05 atau 5% maka dapat diartikan bahwa model regresi logistik telah memiliki kemampuan yang cukup dalam menjelaskan data penelitian dan begitupula sebaliknya.

3.6.3 Uji Kelayakan Keseluruhan Model Regresi Logistik

Berbeda dengan uji kelayakan model regresi logistik sebelumnya, pengujian yang dilakukan untuk melihat kelayakan keseluruhan model regresi logistik menggunakan *Hosmer and Lemeshow Goodness-of-Fit Test*. Apabila pengujian ini menunjukkan tingkat alfa senilai kurang dari 0,05 atau 5% maka dapat diartikan bahwa model regresi logistik belum memiliki kemampuan yang cukup dalam menjelaskan data penelitian dan begitupula sebaliknya.

3.6.4 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dapat menggunakan uji *Nagelkerke R^2* yang akan menginformasikan besarnya kemampuan variabel independen dalam penelitian ini dalam keterkaitannya terhadap

variabel dependen apabila terdapat dua atau lebih variabel independen dalam penelitian.

3.6.5 Uji Ketepatan Pengklasifikasian

Uji ketepatan pengklasifikasian akan menghasilkan output berupa tabel klasifikasi. Apabila nilai persentase keseluruhan dari output tersebut menunjukkan nilai yang tinggi maka berarti tingkat kemampuan pengklasifikasian data menurut model regresi logistik juga semakin tinggi.

3.6.6 Analisis Regresi Logistik

Dalam penelitian ini, uji hipotesis akan dilakukan dengan analisis regresi logistik dikarenakan variabel dependen dalam penelitian ini disajikan dengan data yang terdiri atas dua kategori yaitu perusahaan yang cenderung mengungkapkan kebijakan anti korupsi dan perusahaan yang cenderung tidak mengungkapkan kebijakan anti korupsi. Berikut model regresi yang digunakan:

$$\text{Ln} \frac{p}{p-1} = \alpha + \beta_1 \text{GO} + \beta_2 \text{GT} + \beta_3 \text{FO} + \beta_4 \text{INO} + \beta_5 \text{UNGC} + \beta_6 \text{KT} \\ + \beta_7 \text{INDP} + \beta_8 \text{KA} + e$$

Keterangan:

$\ln \frac{p}{p-1}$: Pengungkapan kebijakan anti korupsi (0 = cenderung tidak mengungkapkan kebijakan anti korupsi; 1 = cenderung mengungkapkan kebijakan anti korupsi)

α : Koefisiensi Regresi Konstanta

$\beta_1 - \beta_8$: Koefisien Variabel Independen

GO : Government Ownerships

GT : Government Tenders

FO : Foreign Ownerships

INO : International Operations

UNGC : UNGC Memberships

KT : Komite Tata Kelola

INDP : Independensi Dewan Komisaris

KA : Kualitas Audit

e : Error

3.6.7 Pengujian Hipotesis

Penelitian satu arah ini akan menggunakan uji *Wald Statistic* dalam pengujian hipotesisnya. Dengan menggunakan uji tersebut, maka kesimpulan dapat diatrik dengan memperhatikan signifikansi pengaruh dalam kolom sig dan arah hipotesis yang ditunjukkan oleh kolom beta. Penerimaan hipotesis terjadi saat nilai sig/2 kurang dari 0.05 dan kolom beta menunjukkan arah positif dan sebaliknya jika

nilai $\text{sig}/2$ lebih dari sama dengan 0.05 dan kolom beta menunjukkan arah negatif maka terjadi penolakan hipotesis.

